

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJAMIN  
DALAM PERJANJIAN PENANGGUNGAN (*BORGTOCHT*)  
DI PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk.**

**Ady Artama Putra<sup>1</sup>, Bambang Winarno<sup>2</sup>, Afifah Kusumadara<sup>3</sup>**

Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. M.T. Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898 Fax (0341) 566505.

Email: artama54@gmail.com

***Abstract***

---

*The purpose of this paper is to study and analyze how the implementation and guarantor form of legal protection for the underwriting agreement (Borgtocht) at PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Branch Jombang. The method used in the writing of this journal is juridical sociological research using socio-juridical approach to studying it from a legal standpoint while the sociological approach comes from the reality on the ground. Based on this research, that the execution of the underwriting agreement made in front of a notary deed authentic. Deed notarized in the underwriting agreement and the content of the formulation is to be equated with a form which has been standardized by BNI Branch Jombang. So there is a standard form of the content and formulation of the underwriting agreement. In making the underwriting agreement, Bank BNI Branch Jombang requires borgtocht release privileges, among others, set forth in section 1820, 1831, 1849 of the Civil Code so that the insurer does not have a proper legal protection when bad credit and can not currently comprehensive legal protection and concrete. Besides BNI also has established procedures serangkaian the underwriting agreement ranging from credit application to debt settlement if there are problems in the credit.*

***Key words:*** legal protection, guarantor, agreement of personal guarantee (borgtocht)

***Abstrak***

---

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan dan bentuk perlindungan hukum bagi penjamin pada perjanjian penanggungan (*Borgtocht*) di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian yuridis sosiologis yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.

<sup>2</sup> Dosen Pascasarjana, Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.

<sup>3</sup> Dosen Pascasarjana, Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.

dengan mengkajinya dari segi hukum sedangkan pendekatan sosiologis berasal dari kenyataan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pelaksanaan perjanjian penanggungan dengan dibuatnya akta otentik didepan notaris. Akta notariil dalam perjanjian penanggungan tersebut isi dan rumusannya harus disamakan dengan formulir yang telah distandarisasi oleh Bank BNI Cabang Jombang. Jadi terdapat bentuk baku dari isi dan rumusan perjanjian penanggungan. Dalam pembuatan perjanjian penanggungan, Bank BNI Cabang Jombang mensyaratkan *borgtocht* melepaskan hak-hak istimewanya antara lain yang tertuang dalam pasal 1820, 1831, 1849 KUHPerdara sehingga pihak penanggung tidak memiliki suatu perlindungan hukum yang layak pada saat kredit macet serta belum mendapatkan perlindungan hukum yang komprehensif dan konkret. Disamping itu Bank BNI juga telah menetapkan serangkaian prosedur dalam perjanjian penanggungan mulai dari pengajuan kredit sampai dengan penyelesaian hutang jika terjadi masalah dalam kredit.

**Kata kunci:** perlindungan hukum, penjamin, perjanjian penanggungan (*borgtocht*)

## Latar Belakang

Perkembangan ekonomi saat ini hampir tidak bisa terlepas dari masalah Perbankan. Bank merupakan aspek penting dalam pertumbuhan modal dan investasi dunia usaha dikalangan para pengusaha sebagai pelaku bisnis. Untuk memperlancar kegiatan perkembangan usahanya, maka seorang pengusaha yang kekurangan modal akan menghubungi pihak bank ataupun pihak non-bank untuk memohon fasilitas pinjaman/kredit. Menurut Iswardono, Bank mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dana yang sementara menganggur untuk dipinjamkan kepada pihak lain atau membeli surat-surat berharga (*Financial Investment*);
- b. Mempermudah di dalam lalu lintas pembayaran uang;
- c. Menjamin keuangan masyarakat yang sementara tidak digunakan;
- d. Menciptakan kredit (*Credit Money deposit*) yaitu dengan cara menciptakan *Demand Deposit* (Deposito yang dapat diuangkan sewaktu-waktu dari kelebihan cadangan).<sup>4</sup>

Perkembangan Kabupaten Jombang yang diagendakan sebagai daerah penyangga Industrialisasi di Jawa Timur mendatang, tentu memerlukan institusi perbankan sebagai sumber pemasok kapital dalam sistem industri. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang yang selanjutnya disebut Bank BNI

---

<sup>4</sup> Iswardono, **Uang dan bank edisi ke-4**, BPFE, Yogyakarta, 2001, halaman 62

merupakan salah satu Bank di Jombang yang dapat memasok kapital untuk kepentingan usaha maupun industri.

Menurut Kennie Dhillon pemberian fasilitas kredit oleh bank idealnya berdasar pada faktor finansial yang tercakup dalam tiga pilar yaitu prospek usaha, kinerja, dan kemampuan calon debitur. Dengan memperhatikan adanya asas *prudential banking principles*, maka faktor finansial saja belum cukup untuk memberikan keyakinan fasilitas kredit tersebut akan kembali dengan aman dan menguntungkan. Sekalipun pada dasarnya agunan merupakan *second wayout*, tetapi arah perkembangan kredit perbankan akhir-akhir ini mengarah pada faktor jaminan/agunan sebagai *variable dominant* yang dapat memberikan keyakinan bagi bank.<sup>5</sup>

Dalam memberikan kredit, Bank semakin diperketat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum dimana bank harus menerapkan Manajemen Resiko secara efektif dan efisien baik untuk bank secara individu maupun secara umum. Walau tidak dijelaskan bahwa setiap pemberian kredit, debitur harus memberikan jaminan (*collateral*) kepada kreditur, tetapi dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan untuk meperoleh keyakinan terhadap debitur, maka bank perlu memperhatikan *The Five C's of Credit*, antara lain : *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (agunan) dan *Condition of Economic* (kondisi atau prospek usaha).<sup>6</sup> Sebagai upaya untuk mengurangi resiko kredit, bank selalu memperhatikan aspek jaminan (*collateral*) sebagai dasar dalam memberikan kredit di bank.

Sesuai pasal 1131 KUH Perdata, segala kebendaan seseorang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang ada maupun baru akan ada dikemudian hari merupakan tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Artinya, seluruh

---

<sup>5</sup> Kennie Dhillon, **Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Bank dengan jaminan Personal Guarantee (Study pada Bank BRI Cabang KCP Willem Iskandar)**, Tesis tidak diterbitkan, Medan: Fakultas Hukum USU, 2012

<sup>6</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi. **Hukum Jaminan edisi Revisi dengan UUHT**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2003, halaman 92

harta kekayaan debitur menjadi jaminan pelunasan atas utang debitur kepada semua kreditur.<sup>7</sup>

Meski demikian, jaminan secara umum ini sering sangat dirasa kurang aman, karena kekayaan si berutang pada suatu waktu bisa habis, dan jaminan berlaku untuk semua kreditur, sehingga jika terdapat banyak kreditur, ada kemungkinan beberapa orang kreditur tidak mendapat bagian. Oleh karena itu, seringkali seorang kreditur meminta diberikan jaminan khusus berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan atau penanggungan (*borgtocht*).<sup>8</sup>

Bank BNI Cabang Jombang menginterpretasikan bahwa Jaminan Perorangan ini merupakan perangkat yang dapat memberikan perlindungan jaminan yang lebih optimal dan dinilai dapat mendukung keyakinan dalam mekanisme pemberian kredit. Jaminan yang diberikan tersebut dapat mengakibatkan kewajiban secara finansial dari pihak penjamin (*guarantor*) untuk menanggung terhadap pemenuhan prestasi apabila pihak yang dijamin (debitur) melakukan cidera janji (*wanprestasi*).<sup>9</sup>

Dalam prakteknya, memang sampai saat ini penggunaan Jaminan Penanggungan masih tetap dipersyaratkan dalam pemberian kredit dikalangan perbankan nasional antara lain untuk:

- a. Kredit-kredit yang dikucurkan bagi perusahaan-perusahaan baik yang sudah berbentuk badan hukum maupun badan usaha dengan alasan bahwa kredit atas nama perusahaan tersebut harus dijamin secara pribadi oleh orang-orang penting di perusahaan tersebut seperti pemegang saham, direksi atau komisaris yang mengelola dan mengawasi jalannya perusahaan tersebut;
- b. Kredit yang dikucurkan bagi perorangan yang alasan-alasan tertentu disyaratkan untuk diberikan jaminan tambahan berupa Jaminan Penanggungan. Alasan-alasan tersebut antara lain karena:
  - 1) Jaminan *fixed assets* kurang mencukupi untuk mengcover jumlah kreditnya.
  - 2) Kredibilitas debitur masih diragukan dalam mengelola usahanya.
  - 3) Usaha debitur merupakan usaha patungan dengan orang lain.

---

<sup>7</sup> Zulkarnaen S. **Jaminan Kredit Kendala dan Masalah**, Makalah dalam Pelatihan Aspek Hukum Perkreditan bagi Staf PT Bank NISP Tbk., Jakarta, 2004

<sup>8</sup> Tutik Retnowati. **Pemberian Kredit Bank Dengan Jaminan Perorangan**. Tesis tidak diterbitkan, Surabaya, Universitas Narotama. 2005. Diakses dari [ejournal.umm.ac.id/index.php/.../304/317\\_umm\\_scientific\\_journal.doc](http://ejournal.umm.ac.id/index.php/.../304/317_umm_scientific_journal.doc). Diakses pada tanggal 25 April 2014

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu T, Kepala bagian Administrasi Kredit dari Bank BNI Cabang Jombang pada tanggal 1 Juli 2014 jam 17.00 WIB

c. Kredit yang jumlahnya relatif besar ( *exposure* kredit besar ).

Dalam prakteknya, sebagian kalangan masih sering terjadi kesalahpahaman mengenai esensi yuridis dari Jaminan Penanggungan. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku, khususnya bab-bab mengenai penjamin utang yang diatur dalam KUH Perdata. Pemahaman yang salah ini tercermin dari adanya anggapan bahwa dengan jaminan penanggungan dalam perjanjian kredit, maka kewajiban pemenuhan prestasi dari pihak penjamin bersifat seketika tatkala pihak debitur yang dijamin melakukan wanprestasi. Tentunya, kondisi yang sebenarnya tidaklah bersifat sedemikian sederhana, namun harus melalui beberapa tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdata bab ketujuh belas tentang Penanggungan utang. Pasal-pasal tersebut menjadi dasar pengaturan dari mekanisme jaminan penanggungan pada kegiatan pemberian kredit yang dilakukan oleh perbankan.

Sutarno dalam bukunya menjelaskan bahwa penjamin ialah cadangan artinya penjamin baru membayar hutang debitur jika debitur tidak memiliki kemampuan lagi atau debitur sama sekali tidak mempunyai harta benda yang dapat disita. Kalau pendapatan lelang sita atas harta benda debitur tidak mencukupi untuk melunasi utangnya, barulah tiba gilirannya untuk menyita harta benda penjamin. Tegasnya apabila seorang penjamin dituntut untuk membayar utang debitur (yang ditanggung olehnya), ia berhak untuk menuntut supaya dilakukan lelang sita lebih dahulu terhadap kekayaan debitur.<sup>10</sup> Hak istimewa yang dimiliki seorang penjamin ini tercantum dalam pasal 1831 KUHPerdata. Hak istimewa tersebut dipertegas pada Pasal 1834 KUHPerdata yaitu pihak penjamin dapat menuntut supaya harta benda debitur lebih dahulu disita dan dilelang, dan membayar lebih dahulu biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penyitaan serta pelalangan tersebut.

Di Bank BNI, prosedur yang berjalan adalah pihak penjamin tidak dapat menuntut harta benda debitur lebih dahulu disita dan dilelang untuk melunasi hutangnya seperti dinyatakan di KUHPerdata tersebut. Karena pihak pemberi jaminan perorangan tanpa mereka pahami, di dalam klausula Perjanjian Penanggungan diwajibkan untuk melepaskan semua hak istimewanya termasuk hak istimewanya untuk menuntut dilakukannya lelang sita lebih dahulu atas harta benda debitur jika terjadi kredit

---

<sup>10</sup> Sutarno, **Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank**, Alfabeta, Bandung, 2009, halaman 239

macet.<sup>11</sup> Hal ini terjadi karena secara psikologis apabila debitur membutuhkan dana atau modal maka akan tunduk pada syarat yang telah ditentukan kreditur agar bisa mendapatkan uang atau modal sehingga posisi bank selaku kreditur selalu lebih tinggi atau kuat apabila dibandingkan dengan posisi debitur. Dengan dasar alasan di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisa tentang: 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian penanggungan (*Borgtocht*) di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang? 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi penjamin pada perjanjian penanggungan (*Borgtocht*) di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian penanggungan (*Borgtocht*) sebagai jaminan kredit di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang dan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi penjamin pada perjanjian penanggungan (*Borgtocht*) yang melepaskan hak istimewa di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang.

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis dengan mengkajinya dari segi hukum sedangkan pendekatan sosiologis berasal dari kenyataan di lapangan sehingga dapat melihat kesenjangan antara norma dengan praktek di lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan borgtocht dan perlindungan hukum bagi penjamin dalam perjanjian penanggungan (borgtocht) di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Analisis bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif, artinya dengan teknik tersebut penulis berupaya untuk mendeskripsikan pokok-pokok permasalahan/isu hukum yang diangkat, kemudian dianalisis untuk ditemukan solusinya melalui telaah bahan hukum yang telah diinventarisir. Setelah dianalisis dengan metode deduktif, berdasarkan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum yang umum yang relevan akan ditemukan kesimpulan umum yang kemudian mengerucut sebagai kesimpulan atas permasalahan/isu hukum yang dikaji guna menjawab permasalahan penelitian serta merumuskan saran bagi seluruh stakeholders yang terkait dalam penelitian ini.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Sri, Rekan notaris Bank BNI Cabang Jombang, pada tanggal 2 Juli 2014 jam 08.00 WIB

## **Pembahasan**

### **A. Pelaksanaan Perjanjian Jaminan Penanggungan (*Borgtocht*) Sebagai Jaminan Kredit di Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang**

Berdirinya PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selanjutnya disebut Bank BNI merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Awalnya berupa pendirian sebuah yayasan yaitu Yayasan Pusat Bank Indonesia, berdasarkan akta notaris R.M Soerojo Nomor 14 Tanggal 9 Oktober 1945. Proses pendirian tersebut ternyata menghadapi banyak kendala, namun akhirnya pada tanggal 5 Juli 1946 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 berhasil didirikan bank sirkulasi atau bank sentral milik Negara Republik Indonesia dengan nama Bank Negara Indonesia Yayasan Pusat Bank Indonesia yang merupakan embrio bagi lahirnya bank ini, kemudian dilebur kedalamnya.

Pada tahun-tahun selanjutnya telah dilakukan berbagai upaya oleh pemerintah untuk memantapkan kedudukan Bank Negara Indonesia sebagai Bank sirkulasi. Akhirnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, khususnya Pasal 21 angka 1 yang menyatakan bahwa bank umum dapat berbentuk; Perusahaan Perseroan, Perusahaan Daerah Koperasi, dan Perseroan Terbatas, maka bentuk hukum Bank Negara Indonesia 1946 diubah menjadi Perusahaan Perseroan dengan nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero). Bulan November 1996, Bank Negara Indonesia (Persero) menjual sebagian sahamnya kepada masyarakat (go publik), sehingga nama lengkapnya menjadi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Dewasa ini, Bank BNI mempunyai 630 kantor yang terdiri dari 238 kantor cabang, 339 kantor cabang pembantu, 38 kantor kas, 15 kios plus yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan 6 kantor cabang di luar negeri yaitu di Singapura, Hongkong, Tokyo, London, New York dan Grand Cayman Island. Bank Negara Indonesia mempunyai hubungan koresponden dengan Bank-Bank penting di seluruh dunia.

Kegiatan bisnis Bank Negara Indonesia tidak hanya berkisar kepada bisnis perbankan saja, melainkan juga bisnis non Bank Bank yang dijalankan oleh beberapa anak perusahaan BNI antara lain PT BNI Multi finance, PT Bina Usaha Indonesia, PT Danaloka Pertama, Asian Development Securities, PT BNI

Nomura Jafco Investment, PT Kliring Deposit Efek Indonesia, PT Bank BNI Sekuritas, PT BNI Finconesia dan lain-lain. Bank BNI memiliki kekuasaan yang boleh dikatakan hampir tidak terlihat yaitu kekuatan dana dari Yayasan Dana Pensiun Bank BNI (YDP Bank BNI). Kekuatan Yayasan Dana Pensiun Bank BNI ini terlihat dari kemampuannya untuk membangun Hotel Sangrila, Wisma 46, Bank Mitsui Swadharma, dan lain-lain.

Bank Negara Indonesia sendiri sebagai induk dari berbagai anak perusahaan, menyediakan seluruh jasa perbankan umum, seperti giro, deposito berjangka, Sertiplus, Taplus, Kartuplus/ ATM, Dollar Plus, Kredit, BNI Master Card, BPH, Transfer, Delegasi Kredit, Inkaso, Safe Deposit Box, Garansi Bank, Surat Keterangan Bank, Cek Multi Guna, Traveller Check, Uang Kertas Asing, Ekspor, Impor, DPLK BNI, PhonePlus, Bill Payment (Pembayaran Telepon/Telex/Facsimile, Listrik, Pajak, SPP) dan berbagai jasa layanan lainnya.

Dasar hukum dari pelaksanaan perjanjian penanggungan (*borgtoth*) di Bank BNI Jombang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1820-Pasal 1850 yang terbagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu:

- a. Bagian pertama tentang sifat penanggungan yaitu Pasal 1820, Penanggungan diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdata, menentukan:  
”Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya”.
- b. Bagian kedua tentang akibat-akibat penanggungan antara si berpiutang dan si penjamin yaitu Pasal 1831, menentukan: “Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya”. Pasal 1832, menentukan: “Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya:
  1. bila ia telah melepaskan hak istimewa untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual;
  2. bila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur terutama secara tanggung-menanggung, dalam hal itu, akibat-akibat perikatannya



diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang-utang tanggung-menanggung;

3. jika debitur dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi;
  4. jika debitur berada keadaan pailit;
  5. dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh Hakim”.
- c. Bagian ketiga tentang akibat-akibat penanggungan antara si berhutang dengan si penjamin yaitu Pasal 1839, menentukan: “Penanggung yang telah membayar dapat menuntut apa yang telah dibayarnya itu dari debitur utama, tanpa memperhatikan apakah penanggungan itu diadakan dengan atau tanpa setahu debitur utama itu. Penuntutan kembali ini dapat dilakukan baik mengenai uang pokok maupun mengenai bunga serta biaya-biaya. Mengenai biaya-biaya tersebut, penanggung hanya dapat menuntutnya kembali sekedar dalam waktu yang dianggap patut ia telah menyampaikan pemberitahuan kepada debitur utama tentang tuntutan-tuntutan yang ditujukan kepadanya. Penanggung juga berhak menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga bila alasan untuk itu memang ada”.

Adapun batasan dan kebijakan jaminan penanggungan di Bank BNI Jombang adalah sebagai berikut:

- a. Penanggungan (*borgtocht*) merupakan cara pengikatan yang harus dilaksanakan Bank BNI terhadap pihak ketiga yang menjamin pelunasan utang debitur.
- b. Penanggungan (*borgtocht*) bersifat pelengkap dari jaminan-jaminan kredit lainnya yang diikat secara gadai, *fidusia*.
- c. Akta perjanjian penganggungan (*borgstelling*) dibuat berdasarkan akta otentik yang dibuat oleh notaris.
- d. Agar Bank BNI dapat secara langsung menuntut penjamin, didalam akta perjanjian penanggungan harus dicantumkan secara tegas klausula yang menyatakan bahwa penjamin utang melepaskan hak-hak istimewa dan eksepsi untuk menuntut agas kekayaan penerima kredit terlebih dahulu disita dan dilelang sebelum penjamin utang melunasi utang debitur.
- e. Setiap penjamin hutang harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa selama penjamin utang masih terikat dalam perjanjian penganggungan

dengan Bank BNI Jombang, penjamin tidak akan mengalihkan kepemilikan atas seluruh atau sebagian kekayaannya dengan cara apapun.

- f. Akta perjanjian penanggungan yang dibuat secara notariil isi dan rumusannya harus disamakan dengan formulir yang telah distandarisasi oleh Bank BNI Jombang.
- g. Penuntutan terhadap penjamin hutang dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut :

- 1) Diselesaikan sendiri oleh Bank BNI Jombang dengan cara:

- a) Mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri.
- b) Mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap diri penanggung utang kepada Pengadilan Niaga. Menurut UU Kepailitan, pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan kepailitan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitur.

- 2) Diserahkan penyelesaiannya kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)

- h. Bila penjamin utang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga bukan atas perkara Bank BNI Jombang, penerima kredit harus menunjuk penjamin utang baru. Kepailitan menyebabkan debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan kedalam harta pailit.

Mengenai pihak ketiga yang bertindak sebagai penjamin, Bank BNI Jombang mengajukan beberapa persyaratan kepada pihak ketiga/penjamin (*borg*). Persyaratan itu diberikan untuk mendapatkan kepastian dan rasa aman kepada pihak bank selaku kreditur dalam melepas kredit kepada debitur yang memberikan jaminan kreditnya berupa pihak ketiga/penanggung (*borg*).

Persyaratan umum mengenai pihak ketiga (penjamin) di Bank BNI sesuai dengan yang tercantum dalam KUHPerdara Pasal 1827 yaitu, si berhutang yang diwajibkan memberikan seorang penjamin, harus mengajukan seorang yang mempunyai kecakapan untuk mengikatkan dirinya dan cukup mampu untuk memenuhi persyaratan, serta berdomisili di wilayah Indonesia. Disamping syarat umum tersebut, secara khusus Bank BNI Jombang juga memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penjamin (*borg*) yaitu penjamin mempunyai

kepentingan langsung atas usaha debitur yang dibiayai oleh Bank BNI Jombang, selengkapnya sebagai berikut :

- a. Yang dimaksud mempunyai kepentingan langsung dalam hal penjamin utang (*borg*) merupakan orang perseorangan, antara lain:
  - 1) Seorang Direktur dari suatu badan usaha (badan hukum) terhadap kegiatan usaha dari badan tersebut.
  - 2) Keluarga dekat dari orang perorangan terhadap kegiatan usaha dari orang perorangan tersebut.
- b. Yang dimaksud mempunyai kepentingan langsung dalam hal penjamin utang (*borg*) merupakan perusahaan berbentuk badan usaha (Badan Hukum) antara lain:
  - 1) Suatu perusahaan terhadap kegiatan usaha perusahaan lain yang merupakan anggota perusahaannya.
  - 2) Suatu perusahaan pemasok terhadap kegiatan usaha perusahaan yang dipasoknya atau sebaliknya.
  - 3) Suatu perusahaan terhadap kegiatan usaha perusahaan lain yang mempunyai keterikatan resiprokal dengannya.

Jika melihat adanya kriteria penjamin baik untuk perseorangan (*personal guarantee*) maupun untuk perusahaan (*corporate guarantee*), tidak bisa disangkal betapa pentingnya jaminan penanggungan dalam proses pemberian kredit di Bank BNI Jombang. Hal ini karena jaminan baik berupa jaminan perorangan (*personal guarantee*) maupun jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dalam pemberian kredit memiliki fungsi yang sangat penting dan masih banyak dilakukan meskipun dalam kedudukannya hanya sebagai jaminan tambahan. Bagi penjamin yang ada ikatan keluarga dekat dari pelaku usaha orang perorangan pada umumnya memiliki ikatan moral yang tinggi. Nama baik keluarga, marga dan kelompok adat lainnya adalah nama baik bersama. Normalnya, pada umumnya keluarga dekat akan membantu kesulitan anggota keluarga lainnya. Jika terjadi penyitaan oleh bank terhadap harta benda akibat tidak mampu mengembalikan kredit yang diterimanya tidak hanya aib bagi debitur sendiri tetapi juga merupakan aib bagi keluarga juga.

Pada prinsipnya, keterikatan antara penjamin dengan debitur harus sedemikian eratnya sehingga penjamin tidak hanya terikat secara moral tetapi

juga lebih dari itu, kepentingan penjamin akan sangat dipengaruhi oleh kelancaran dan maju mundurnya perusahaan debitur.

Menurut penulis, selain kriteria yang sudah ditetapkan Bank BNI diatas perlu ditambahkan dengan persyaratan yang menyatakan bahwa penjamin harus memiliki rekam jejak (*track record*) yang baik dalam dunia usaha dan hubungannya dengan kredit perbankan. Itikad baik dari penjamin dalam suatu perjanjian penanggungan merupakan kata kunci terhadap terlaksanakannya kewajiban dan tanggung jawab terhadap perjanjian yang sudah dibuat.

Apabila ketentuan dalam undang-undang dan pedoman pelaksanaan kredit ini dilaksanakan secara konsisten, maka melalui penggunaan lembaga jaminan penanggungan ini akan dapat memperkecil resiko Bank BNI terhadap terjadinya kredit macet. Bagi Bank BNI Jombang pelaksanaan jaminan penanggungan ini sekaligus dapat menjawab terhadap diberlakukannya prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit seperti yang diamanahkan dalam Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan.

Secara umum, proses pemberian kredit dengan jaminan penanggungan dari awal (pengajuan permohonan kredit) oleh pemohon (calon debitur) sampai proses pengesahan oleh kreditur di Bank BNI Jombang dapat diuraikan dalam berbagai tahap sebagai berikut :

- a. Tahap pertama : Pemohon (calon debitur) membuat surat permohonan kredit, kemudian surat permohonan kredit tersebut dikirimkan kepada Bank BNI Jombang disertai dengan syarat-syarat permohonan kredit.
- b. Tahap kedua : Surat permohonan kredit tersebut diberikan dan diterima oleh Analis Kredit untuk dilakukan pemrosesan kredit. Pemrosesan kredit dilakukan dengan cara:
  - 1) Melakukan pengecekan kelengkapan dan keabsahan data-data dan ijin usaha dari pemohon;
  - 2) Meninjau lokasi usaha pemohon (*On The Spot*);
  - 3) Melakukan verifikasi dan klarifikasi usaha dari pemohon dan rekanannya;
  - 4) Analisa kredit, meliputi : analisa keuangan, analisa kebutuhan modal kerja, dll;

- 5) Melakukan pengecekan terhadap informasi lainnya, misalnya melalui surat kabar yang memberikan informasi tentang komoditi barang dagangan pemohon (calon debitur).
- c. Tahap ketiga : Setelah data terkumpul, Analis Kredit mengusulkan permohonan kredit tersebut kepada Pejabat Pemutus Kredit untuk diputuskan apakah permohonan kredit tersebut ditolak atau disetujui.
- d. Tahap keempat : Permohonan kredit yang ditolak akan dibuatkan surat penolakan kepada pemohon, sedangkan permohonan kredit yang diterima dan disetujui akan dibuatkan surat keputusan kredit yang ditujukan kepada pemohon untuk dilakukan penandatanganan persetujuan oleh pemohon.
- e. Tahap kelima : Setelah menerima dan menandatangani surat keputusan kredit, pemohon menandatangani surat perjanjian kredit (Akad Kredit), sekaligus menyerahkan jaminan yang akan diberikan kepada pihak Bank, jaminan itu bisa berupa :
- 1) Jaminan benda tidak bergerak yang diikat secara Hak Tanggungan;
  - 2) Jaminan benda bergerak yang diikat secara *fiducia*;
  - 3) Jaminan perorangan yang diikat secara *Borgtotch*.
- f. Tahap keenam : Setelah pemohon menandatangani perjanjian kredit (Akad Kredit) serta menyerahkan barang jaminan, selanjutnya pemohon beserta penanggung (*borg*) nya menandatangani perjanjian *accessoir* yaitu perjanjian *borgtotch* (*borgstelling*). Setelah penandatanganan perjanjian *accessoir* dilakukan oleh pemohon beserta penanggungnya, proses pencairan kredit dapat dilakukan. Perikatan jaminan penanggungan di Bank BNI Jombang dilakukan dengan akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai sampel adalah jaminan perorangan (*personal guarantee*) yang diikat dengan Akta Notaris Nomor 269/HT/JMB/V/2012 tanggal 31-05-2012 yang dibuat oleh Sri Munarsih, SH. MKn. notaris di Jombang yang beralamat di Jl. Kartini No.1 Jombang (lampiran 1).

Penetapan besarnya uang pinjaman (kredit) yang diberikan kepada calon debitur terutama ditekankan pada kelayakan usaha calon debitur, disamping nilai dari jaminan yang dijadikan obyek jaminan kredit. Penilaian kelayakan usaha calon debitur dilakukan dengan menggunakan prinsip dasar penilaian

usaha (*Five C's of Credit Analysis*), yaitu Karakter (*Character*), Kapasitas (*Capacity*), Modal (*Capital*), Jaminan (*Collateral*), dan Kondisi (*Condition*)

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, bahwa kewajiban utama *borg* adalah menanggung pembayaran hutang debitur ketika debitur wanprestasi atau jumlah hasil penjualan harta benda debitur tidak cukup untuk melunasi hutangnya. Dengan mencermati prosedur pelaksanaan perjanjian penganggungan pada Bank BNI Jombang dan peraturan perundang-undangan maka ada tiga kewajiban pokok *borg* atas debitur Bank BNI Jombang yaitu :

- a. Menandatangani perjanjian dan pernyataan penanggungan hutang yang antara lain memuat kesediaan untuk menanggung hutang *debitur* serta melepas hak-hak istimewa dan hak tangkisan (eksepsi) seperti diatur oleh antara lain pasal 1430, 1831 KUH Perdata.
- b. Memberikan pernyataan bahwa *borg* selama penanggungan hutang masih terkait dengan penanggungan hutang, tanpa seizin Bank BNI Jombang, *borg* tidak akan mengalihkan kepemilikan atas seluruh atau sebagian harta kekayaannya dengan cara apapun.
- c. Melunasi hutang debitur yang ditanggungnya segera setelah *borg* diberitahu bahwa pengembalian debitur yang ditanggungnya dalam keadaan macet.

Dalam prakteknya di Bank BNI Jombang, meskipun *borg* telah melakukan kewajiban pokok yang pertama tidak serta merta pelaksanaan kewajiban *borg* untuk melunasi hutang debitur yang ditanggungnya berjalan dengan mulus. Pada umumnya, terutama para penjamin hutang dengan skala besar melakukan upaya untuk menghindar dari pelaksanaan pembayaran dengan mengajukan alasan-alasan atau argumen hukum yang pada intinya *borg* tersebut tidak menganggap memiliki kewajiban atau sekurang-kurangnya menyatakan bahwa pengembalian kredit debitur belum atau tidak terbukti untuk dinyatakan macet.

Tata cara melakukan penuntutan kepada penanggung hutang untuk kredit macet yang penyelesaiannya ditangani oleh Bank BNI Jombang sendiri:

- a. Pada tahap pertama, Bank BNI Jombang melakukan teguran secara tertulis kepada Penanggung hutang untuk memenuhi kewajibannya, disamping secara aktif mencari informasi harta kekayaan penanggung hutang.
- b. Apabila dengan teguran tersebut penanggung hutang masih belum memenuhi kewajibannya, maka langkah yang ditempuh selanjutnya adalah

- 1) Bank BNI Jombang melakukan teguran (somasi) melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi domisili penanggung hutang atau domisili yang dipilih dalam perjanjian penanggungan. Dalam somasi inilah kreditur menyatakan kehendaknya bahwa perjanjian harus dilaksanakan dalam waktu tertentu.<sup>12</sup> Somasi diperlukan tidak hanya untuk penuntutan penggantian biaya, rugi dan bunga tetapi juga untuk terjadinya peralihan resiko.<sup>13</sup>
- 2) Apabila dengan somasi tersebut penanggung hutang belum memenuhi kewajibannya, maka Bank BNI Jombang mengajukan gugatan perdata kepada penanggung hutang (sebagai tergugat I), dan penerima kredit (sebagai tergugat II) melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi domisili penanggung hutang atau domisili yang telah dipilih dalam perjanjian penanggungan.

Disamping itu Bank BNI Jombang sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), memiliki perangkat hukum yang cukup lengkap sehingga memungkinkan untuk melakukan tindakan lanjutan selain tuntutan perdata, antara lain :

- a. Menyerahkan penagihan dan penuntutan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- b. Pemblokiran dan Penyitaann harta kekayaan milik *borg* melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
- c. Pencegahan ke luar negeri
- d. Lembaga Paksa Badan

## **B. Perlindungan Hukum bagi Penjamin dalam perjanjian Penanggungan di Bank BNI Cabang Jombang**

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dan hasil penelitian diperoleh bahwa memang benar pelaksanaan perjanjian penanggungan di Bank BNI Jombang dilaksanakan dengan dibuatnya akta otentik didepan notaris. Dalam pembuatan perjanjian penanggungan, Bank BNI Jombang mensyaratkan *borg* melepaskan

---

<sup>12</sup> Yahya Harahap. **Segi-segi Hukum Perjanjian**, Alumni, Bandung, 1986, halaman 62.

<sup>13</sup> Hadijan Ruslim, **Hukum Perjanjian Indonesia dan Coomon Law**. Pustaka Sinar harapan, Jakarta, 1996, halaman 139.

hak-hak istimewa dan hak lain yang diatur oleh Undang-undang ( Lampiran 1). Akta notariil dalam perjanjian penanggungan tersebut isi dan rumusannya harus disamakan dengan formulir yang telah distandarisasi oleh Bank BNI Jombang. Jadi terdapat bentuk baku dari isi dan rumusan perjanjian penanggungan.

Dengan adanya bentuk baku dari isi dan rumusan perjanjian ini maka *borg* hanya melakukan persetujuan saja sehingga secara yuridis *borg* akan kehilangan hak untuk melakukan negosiasi (asas kebebasan berkontrak) dalam merumuskan isi dan rumusan perjanjian penanggungan. Namun demikian karena keterbatasan calon *borg* dan hal ini merupakan syarat bagi Bank BNI Jombang untuk mengucurkan kredit maka calon *borg* umumnya tidak begitu mempermasalahkannya. Berdasarkan diantara hak-hak terpenting yang dimiliki oleh seorang penanggung yang selalu diminta agar dilepaskan pada saat penanggung tadi menandatangani perjanjian penanggungan adalah:

- a. Hak agar Debitur ditagih terlebih dahulu (pasal 1831 – 1832 KUHPerdato)
- b. Hak untuk menentukan pemecahan hutang (Pasal 1837 KUHPerdato)
- c. Hak untuk melakukan tagihan terhadap hutang-hutang yang dimiliki oleh debitur (Pasal 1847 KUHPerdato)
- d. Penanggung pada umumnya juga dimintakan untuk melepaskan hak yang dimiliki olehnya berdasarkan Pasal 1848 KUHPerdato.

Dengan melakukan pembayaran dalam rangka pemberian jaminan, maka sebenarnya seorang penanggung dalam posisinya terhadap debitur, setelah melunasi hutang-hutang debitur kepada kreditur, maka posisinya akan menggantikan kedudukan si kreditur tadi. Pasal 1948 KUHPerdato menyatakan apabila karena kesalahan kreditur, seorang penanggung dirugikan sehingga ia tidak bisa melaksanakan hak subrogasinya terhadap debitur, maka ia dilepaskan dari kedudukannya sebagai penanggung.

Hal ini biasanya terjadi jika pemberian kredit oleh kreditur kepada debitur tadi, selain dijamin dengan jaminan pribadi oleh penanggung, juga dijamin dengan hak tanggungan atas barang tidak bergerak milik debitur sendiri. Dalam situasi yang terakhir ini, sebelumnya kreditur melaksanakan haknya untuk menuntut pelunasan piutangnya kepada debitur dengan cara menjual melalui lelang eksekusi barang tidak bergerak yang dijaminkan oleh debitur tadi, maka kreditur harus memberitahukan hal itu terlebih dahulu pada penanggung. Hal ini



dimaksudkan untuk mencegah si penanggung menderita kerugian yakni masih harus melunasi hutang debitur kepada kreditur apabila perolehan lelang eksekusi atas barang tidak bergerak tadi tidak mencukupi untuk melunasi seluruh hutang debitur. Dalam hal penanggungan, penanggung diberitahu tentang rencana kreditur untuk melakukan lelang eksekusi atas barang tidak bergerak tadi, maka penanggung bisa melakukan upaya-upaya untuk mencari seorang pembeli dengan maksud agar hasil lelang eksekusi tadi mencukupi untuk melunasi seluruh hutang debitur pada krediturnya (khususnya apabila dengan bertambahnya bunga dan denda hutang debitur telah menjadi demikian besarnya). Dengan upaya yang terakhir ini, penanggung tidak akan dirugikan dalam menjalankan hak subrogasinya terhadap debitur.

Dalam perjanjian-perjanjian pemberian jaminan pelepasan hak yang dimiliki penanggung tadi lazim disebut “*Waiver*” (Surat pembatalan atau pencabutan hak resmi). Kreditur yang cermat selalu berupaya agar “*Waiver*” yang diberikan oleh penanggung bersifat lengkap.

Dalam suatu perjanjian, pemberian jaminan bersifat *accessoir*, berarti sekalipun seorang penanggung diminta untuk melakukan beberapa “*Waiver*”, suatu perjanjian pemberian jaminan tetap saja bersifat *accessoir*; dalam arti jika perjanjian pokoknya batal maka perjanjian pemberian jaminan pun akan batal demi hukum. Untuk mencegah terjadinya hal ini, kreditur mencari suatu konstruksi hukum lain yang dimungkinkan oleh ketentuan pasal 1316 KUHPerdota. Menurut ketentuan pasal ini, disamping memberikan jaminan, seorang penanggung memberikan *indemnity* (penggantian rugi atau jaminan kerugian) kepada kreditur. Dengan memberikan *indemnity*, maka tercipta suatu hubungan kontraktual dalam suatu perjanjian antara penanggung dengan kreditur, yang berdiri terlepas dari perjanjian pokoknya. Pemberian *indemnity* ini melahirkan perjanjian yang mandiri antara pemberi *indemnity* dengan kreditur, yang tidak bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokoknya (perjanjian hutang piutang antara kreditur dengan debitur); sehingga sekalipun ada ikatan perjanjian pokoknya batal, perjanjian pemberian *indemnity* ini tetap berdiri dengan demikian posisi kreditur diperkuat.

Dalam butir-butir diatas dibicarakan dua cara pokok untuk memperkuat posisi kreditur, yakni pemberian perjanjian penanggungan (*Borgtocht*) oleh

seorang pihak ketiga, berikut segala “ *Waivernya*”. Dengan demikian maka dalam perjanjian penanggungan berhadapan dengan adanya dua hubungan kontraktual, masing-masing antara :

- a. Kreditur dengan debitur yang menimbulkan perjanjian pokok, dan
- b. Perjanjian pemberian jaminan oleh pihak ketiga terhadap krediturnya, yang menimbulkan perjanjian yang bersifat *accessoir*.

Hal ini menunjukkan bahwa sebuah perlindungan hukum yang komprehensif adalah suatu kebutuhan yang mendesak. Negara Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya yang sesuai dengan Pancasila. Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut :<sup>14</sup>

- a. Membuat peraturan (*by giving regulation*)
- b. Menegakkan Peraturan (*by law enforcement*)

Perjanjian Penanggungan hutang melibatkan tiga pihak yang terkait, yaitu kreditur, debitur dan *borg*. Kreditur berkedudukan sebagai pemberi kredit, atau pihak berpiutang, sedang debitur adalah orang yang mendapat pinjaman uang dari kreditur. *Borg* adalah pihak ketiga yang menanggung hutang debitur kepada kreditur, manakala debitur tidak memenuhi prestasinya.

Pada prinsipnya penjamin tidak wajib membayar hutang debitur kepada kreditur, kecuali jika debitur lalai membayar hutangnya. KUHPerdara bagian 2 tentang akibat-akibat penanggungan antara kreditur dan penanggung pasal 1831 menyatakan bahwa “Penanggung tidak wajib membayar utangnya, dalam hal itupun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dulu untuk melunasi hutangnya”.

---

<sup>14</sup> Wahyu Sasongko, **Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen**. Penerbit Universitas Lampung, Lampung, 2007, Halaman 31

## Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Jombang sampai saat ini masih melaksanakan perjanjian penanggungan. Dalam prakteknya Bank BNI menetapkan persyaratan khusus yang harus dipenuhi bagi penanggung (borg) terhadap fasilitas kredit yang diterima debitur. Disamping itu Bank BNI juga telah menetapkan serangkaian prosedur dalam perjanjian penanggungan mulai dari pengajuan kredit sampai dengan penyelesaian hutang jika terjadi masalah dalam kredit. Penerapan perjanjian penanggungan ini dirasakan Bank BNI cukup efektif (sebagai *moral obligation*) dalam melindungi kepentingan Bank terhadap kepastian pengembalian dari kredit yang disalurkan.
- b. Klausula perjanjian jaminan perorangan yang diterapkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Jombang mengesampingkan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh seorang penjamin karena penjamin (borg) diharuskan melepaskan hak-hak istimewanya yang dijamin undang-undang, sehingga pihak penanggung tidak memiliki suatu perlindungan hukum yang layak pada saat kredit macet serta belum mendapatkan perlindungan hukum yang komprehensif dan konkret. Dengan demikian membuat pihak pemberi jaminan perorangan tidak dapat melaksanakan hak-hak yang dimilikinya berdasarkan KUHPdata pada saat eksekusi kredit macet.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Zainuddin, 2000, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Astiko. 1996, **Manajemen Perkreditan**. Andi Offset. Yogyakarta.
- Badrulzaman, Mariam Darus, 1998, **Perjanjian Kredit Bank**, Alumni, Bandung.
- Bahsan, M, **Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Hadjon, Philipus M, 1987, **Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia; Sebuah Studi tentang prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum**, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Harahap, Yahya, 1986, **Segi-segi Hukum Perjanjian**, Alumni, Bandung.
- Harun, Badriyah, 2010, **Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Hasan, Djuhaedah, 1996, **Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Penerapan Asas Pemisahan Horizontal**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Iswardono, 2001, **Uang dan bank edisi ke-4**, BPFE, Yogyakarta.
- Patrik, Purwahid dan Kashadi, 2003, **Hukum Jaminan edisi Revisi dengan UUHT**. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sutarno, 2009, **Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank**, Alfabeta, Bandung.
- Supratmono, Gatot, 1995, **Perbankan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis**, Djambatan, Jakarta.
- Sutarno, 2009, **Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank**, Alfabeta, Bandung.
- Untung, Budi, 2000, **Kredit Perbankan di Indonesia**, Andi Offset, Yogyakarta.
- Widiyono, Try, 2009, **Agunan Kredit dalam Financial Engineering**, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Wulan, Retno, 1997, **Perjanjian Kredit dan Macam-macam Jeminan Kredit Dalam Praktek Hukum di Indonesia**. Pustaka Peradilan Jilid 1, Mahkamah Agung-RI, Jakarta.

### **Karya Ilmiah:**

Dhillon, Kennie, 2012, **Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Bank dengan jaminan Personal Guarantee (Study pada Bank BRI Cabang KCP Willem Iskandar)**, Tesis tidak diterbitkan, Medan: Fakultas Hukum USU.

Retnowati, Tutik, 2005, **Pemberian Kredit Bank Dengan Jaminan Perorangan**. Tesis tidak diterbitkan, Universitas Narotama, Surabaya.

### **Makalah**

Zulkarnaen, 2004, **Jaminan Kredit Kendala dan Masalah**, Makalah dalam Pelatihan Aspek Hukum Perkreditan bagi Staf PT Bank NISP Tbk, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum.

Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 8 ayat (1). Pasal 1 ayat (11).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R.Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cetakan ke-3. Jakarta: Pradya Paramita. 1976.